



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

## BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023 ini dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Renja ini berpedoman pada Rancangan Renstra SKPA dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 serta hasil evaluasi hasil Renja SKPA Tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja SKPA Tahun berjalan. Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dokumen ini juga memberi gambaran tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi anggaran dan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun lalu.

Bahwa dengan tersusunnya Renja 2023 ini, diharapkan efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung RPA periode 2023 – 2026 dalam pelayanan publik pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk proses perkembangan lebih lanjut.

Jakarta, 01 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PEMERINTAH ACEH

  
**AKKAR ARAFAT, S.STP, M.Si**  
Pembina  
Nip. 19850619 200312 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan.....	3
1.4    Sitematika Penulisan.....	3
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH              ACEH TAHUN LALU</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh.....	7
2.1.1  Faktor-faktor Penyebab Terpenuhinya, Tidak Terpenuhinya Kinerja, Implikasi Yang Timbul Dan Kebijakan/Tindakan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut .....	10
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh ....	11
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh.....	11
2.3.1  Koordinasi dan sinergi Program Antar SKPA dengan Kab/Kota.....	11
2.3.2  Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi BPPA.....	12
2.3.3  Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan BPPA .....	12
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	13
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	13
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH              ACEH</b>	
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	15
3.2    Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh .....	15
3.3    Program dan Kegiatan .....	16

<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH</b>	
	Berisi Tabel 3.4.....	18
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUPAN .....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana di amanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di implimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).

Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah, yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, penganggaran dan sumber daya yang diperlukan.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas pokok dalam hal pelayanan, koordinasi dalam kelancaran hubungan antar lembaga, promosi dan pemasaran potensi daerah melalui pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan serta pengelolaan Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.

Dalam kerangka inilah Badan Penghubung Pemerintah Aceh menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2023 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu Tahun Anggaran mendatang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Tahun sebelumnya dan Tahun berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2017 s/d 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja SKPA ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembar Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007–2012;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
14. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017–2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Secara umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023 bertujuan menginterpretasikan RKPA Tahun 2023 jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai fasilitator di Jakarta yang mendukung 2 Program Prioritas Pemerintah Aceh yang di jabarkan dalam RPA 2023-2026. Secara khusus tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam aspek fasilitator dan koordinator sesuai program kerja yang telah direncanakan.
2. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan dan promosi serta pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menjadi solusi dalam menangani isu-isu strategis tentang pelaksanaan pelayanan dan promosi sehingga menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang lebih fokus, terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Pemerintha Aceh**

tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Lampiran *tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh*

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, dengan melampirkan *tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh*.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Berisikan uraian mengenai :

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan;
5. Isu-isu penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
4. Lampiran *tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2022.*

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
3. Lampiran *tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.*

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penghubung Pemerintah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisi Penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM dan Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dll);
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain jumlah program dan kegiatan, total kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- c. *tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpa Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023.*

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tabel T-C 3.4 *Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023*

## BAB V PENUTUPAN

Berisi catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## LAMPIRAN

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH TAHUN LALU

#### a.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Pada tahun 2021 Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan untuk mendukung kelancaran hubungan antar lembaga, promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. Ada 7 program terdiri dari 31 kegiatan yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk menunjang tugas tersebut melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 sebesar **Rp. 28.382.203.859,-** (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Badan Penghubung Pemerintah Aceh merealisasikan **Rp.26.002.883.059,-** (*Dua puluh enam milyar dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah*) atau 91,62%

Mengingat program dan kegiatan tahun 2022 masih dalam tahap pelaksanaan, maka evaluasi rencana kerja SKPA di ukur melalui Capaian Kinerja pada tahun 2021. Secara rinci pelaksanaan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai berikut :

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Mencakup 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan rutin perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 22.606.275.433,- terbagi dalam beberapa rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.894.200,- atau sebesar 99,74%.
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.894.200,- atau sebesar 99,74%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.453.976.589,- atau sebesar 87,22%

- a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.076.026.589,- atau sebesar 86,66%.
- b. Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.377.950.000,- atau sebesar 88,24%
3. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik 99,24% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.000.000,- atau sebesar 99,24%
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.69.000.000 atau sebesar 98,18%.
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.000.000,- atau sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.268.056.373,- atau sebesar 99,57%.
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.110.339.000,- atau sebesar 99,82%.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.257.280.000,- atau sebesar 98,95%.
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.271.448.530,- atau sebesar 99,60%.
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.827.192.053,- atau sebesar 99,62%.
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.52.488.000,- atau sebesar 88,76%.
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.31.200.000,- atau sebesar 98,11%
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.718.108.790,- atau sebesar 99,99%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 231.563.312,- atau sebesar 53,95%.

- a. Pengadaan Mebel dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.163.763.312,- atau sebesar 99,87%
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan capaian realisasi fisik sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.800.000,- atau sebesar 25,56%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.218.675.732,- atau sebesar 98,15%.
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.484.499.636,- atau sebesar 99,90%
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.427.686.444,- atau sebesar 96,21%.
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.721.588.657,- atau sebesar 90,74%
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.584.900.995,- atau sebesar 99,64%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.226.109.227,- atau sebesar 99,05%.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.276.394.067,- atau sebesar 99,05%
  - b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.070.732.400,- atau sebesar 74,86%
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.878.982.760,- atau sebesar 99,36%

**b. Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**

Terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan spesifik dengan realisasi anggaran Rp. 3.396.607.626,- dalam rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 470.537.415,- atau sebesar 97,24%
- b. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat dengan capaian

realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 245.191.340,- atau sebesar 82,83%

- c. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.693.900,- atau sebesar 94,48%
- d. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 315.202.985,- atau sebesar 58,57%
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.130

Sedangkan untuk tahun 2022 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penghubung Pemerintah Aceh masih dalam pembahasan, Badan Penghubung Pemerintah Aceh merencanakan akan melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 sebesar Rp. 38.000.000.000,-

#### **2.1.1. Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya, Tidak Terpenuhinya Kinerja, Implikasi Yang Timbul Dan Kebijakan/Tindakan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.**

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat terlaksana dengan baik. Namun untuk sub kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya hanya terealisasi 58,57%, karena kondisi pandemi covid 19 sehingga kegiatan dilaksanakan secara virtual, maka beberapa biaya kegiatan tidak terpakai.

#### **e.1 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

Program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang disusun berdasarkan Renja Tahun 2021 merupakan Program prioritas dari Pemerintah Aceh yang telah diamanahkan dalam RPJMA dan Renstra SKPA Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2017 - 2022. Peningkatan kinerja

pelayanan SKPA seiring dengan rencana kerja dan ketersediaan pagu Anggaran yang disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu indikator yang diukur Pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah persentase kepuasan pelayanan. Namun tingkat kepuasan masih dirumuskan dalam satuan persentase, dengan melihat persentase masyarakat yang puas dari keseluruhan masyarakat yang dilayani. Perhitungan tingkat kepuasan belum merujuk pada indek kepuasan. Untuk melihat lebih rinci indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.30.

Pengukuran kepuasan pelayanan ditujukan pada pelayanan terhadap masyarakat dan kepuasan pengunjung website Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Instrumen pengukuran dengan pengisian kuesioner terhadap kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan.

## **e.2 Isu-Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

### **2.3.1. Koordinasi dan sinergi program antar SKPA dengan Kabupaten/Kota**

Badan Penghubung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memiliki tugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintah dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah . Secara garis besar Badan Penghubung yang berlokasi di Ibukota negara hanya sebagai penunjang kegiatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka program-program Badan Penghubung Pemerintah Aceh tidak terkait langsung dengan program Perangkat Daerah Kab/Kota dan K/L

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

Di dalam melaksanakan tugas sehari-hari Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta pastilah mendapat permasalahan dan hambatan dilapangan yang kemudian ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk dapat diselesaikan, antara lain :

1. Standar Operasi Pelayanan yang masih kurang berjalan.
2. Sarana dan prasarana kegiatan protokoler masih kurang.

3. Sarana dan Prasarana untuk kegiatan seni budaya perlu ditingkatkan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pelayanan, Badan Penghubung Pemerintah Aceh masih melakukan pengkajian mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal), sehingga akan melahirkan Peraturan Gubernur /legalitas hukum formal dalam proses pelayanan prima yang dilakukan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh sehingga kedepan diharapkan dengan lahirnya peraturan tersebut, akan memperbaiki kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

### **2.3.3. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

Adapun isu-isu penting yang menjadi perhatian Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam menyusun program dan kegiatan tidak terlepas dari apa yang tertuang dalam RPJMA. Dalam RPJMA , Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai tugas dan fungsi mempunyai peran untuk ikut mewujudkan 3 Misi Kepala Daerah yaitu :

1. Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Aslusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain;
3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam pencapaian Misi pertama yaitu *Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan*, program unggulan yang terkait adalah *Aceh Pemulia*, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi kedua *Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Aslusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain*, program unggulan yang terkait adalah *Aceh Meuadab*, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja

yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah menguatkan tata budaya adat Istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.

Sedangkan Misi ketiga *Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan*, misi ini berkaitan dengan program unggulan SIAT, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah ikut berperan mendukung Pemerintah Aceh dalam membangun Bank Data yang terintegrasi.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh, dari analisis faktor eksternal ditemukan berbagai *peluang* yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- b. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai;
- c. Berlokasi di Jakarta, maka lebih memudahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga Negara;
- d. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi di Anjungan Aceh TMII.

Sedangkan *tantangan* yang dihadapi yaitu :

- a. Tuntutan standar pelayanan yang berkualitas;
- b. Kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelayanan;
- c. Penyediaan Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan;
- d. Tuntutan pengelolaan informasi yang memadai.

### **e.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan hasil review Rancangan RKPA terdapat masalah yang dihadapi dan kemajuan yang telah dicapai. Peningkatan hasil pelayanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu diupayakan secara simultan melalui perencanaan, implementasi dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Secara umum evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Badan Penghubung Pemerintah Aceh melakukan sejumlah perbandingan dalam upaya melakukan pengukuran kinerja agar diketahui keberhasilan atau tidaknya. perbandingan yang bisa dilakukan yaitu dengan Membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun lalu. Perbandingan ini dijadikan tolok ukur untuk perencanaan kedepan. Hal ini dijabarkan dalam tabel T-C.31

#### **e.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk tahun 2023 belum ada usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Badan Penghubung Pemerintah Aceh oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan (table T-C.32). Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Badan Penghubung Pemerintah Aceh di tahun 2022 masih dalam penyesuaian program dan kegiatan sesuai ketentuan tersebut.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam upaya mendukung terwujudnya pembangunan nasional, Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai bagian dari perangkat Pemerintah Aceh yang memiliki peran memfasilitasi dan mengkoordinasi segala bentuk kegiatan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Indonesia.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu berdasarkan misi dan isu-isu penting tersebut , maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh yaitu :

##### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				akhir periode
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	66	67	68	68

1.1	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,32	3,4	3,5	3,55	3,55
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------	------	-----	-----	------	------

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan RPA 2023-2026, maka Badan Penghubung Pemerintah Aceh merumuskan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung misi tersebut, terdiri dari 2 program , 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan lokasi pelaksanaan di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berikut rinciannya :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

##### c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

**2. Program Pelayanan Penghubung**

**a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
2. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
3. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
4. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

Dari Beberapa uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh pada Bab III, maka pada Bab IV diuraikan dalam tabel beberapa point terkait program dan kegiatan tersebut yaitu indikator kinerja dan target serta kebutuhan dana/ Pagu Indikatif untuk tahun 2023. Tabel tersebut terlampir dalam table T-C.3.4 *RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH* TAHUN 2023.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dalam menyiasati keterbatasan anggaran yang diberikan kami akan menetapkan skala prioritas berdasarkan tugas utama yaitu pelayanan kepada Pimpinan Daerah, hubungan dan kerjasama antar lembaga ,membina masyarakat Aceh perantauan serta menyelenggarakan promosi daerah. Harapan kami agar program dan kegiatan yang direncanakan mendapat dukungan penuh sehingga maksud dan tujuan pembangunan daerah tercapai.

Jakarta, 01 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PEMERINTAH ACEH

  
**AKKAR ARAFAT. S.STP. M.Si**  
Pembina  
Nip. 19850619 200312 1 001

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2017- 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program & Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13				
5														
5	06													
5	06	01			100 %			100		100				
5	06	01	1,01		100 %			100		100				
5	06	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SAKIP yaitu Lakip, Renja, LKPJ dan Keuangan Terselesaikan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100,00
5	06	01	1,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan BPPA	100 %				100			100
5	06	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
5	06	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
5	06	01	1,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kompetensi	100 %				100			100

5	06	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai	380 pegawai	24 pegawai	110 pegawai	110 pegawai	100	110 pegawai	244 pegawai	64,21
5	06	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	170 orang	0 orang	50 orang	50 orang	100	110 orang	160 orang	94,12
5	06	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	100 %				100			100
5	06	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	20 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100	4 Gedung	12 Gedung	60
5	06	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	100 barang	25 barang	25 barang	16 barang	64	25 barang	66 barang	66
5	06	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	10 jenis	66,67
5	06	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	55 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100	11 bulan	33 bulan	60
5	06	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	150 jenis	15 jenis	30 jenis	15 jenis	50	30 jenis	60 jenis	40,00
5	06	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	15 jenis	60
5	06	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	620 kali	119 kali	140 kali	321 kali	229,286	140 kali	580 kali	93,55
5	06	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	100 %				100			100

5	06	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	4 unit	4 unit	40
5	06	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	4 unit	4 unit	40
5	06	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas dan Anjungan Aceh	16 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100	4 gedung	12 gedung	75
5	06	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 unit	0 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	2 unit	40
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>1,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	100 %				100			100
5	06	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	408 paket	80 paket	80 paket	80 paket	100	160 paket	320 paket	78,43
5	06	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
5	06	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 barang	25 barang	25 barang	32 barang	128	25 barang	82 barang	82
5	06	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor/gedung	20 Gedung	3 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100	4 Gedung	11 Gedung	55

5	06	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	100 %				100			100
5	06	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/ operasional , 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	800 service	44 service	160 service	62 service	38,75	160 service	266 service	33,25
							130 STNK	36 STNK	33 STNK	30 STNK	90,91	33 STNK	99 STNK	76,15
5	06	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas dan Anjungan Aceh	20 gedung	3 gedung	4 gedung	4 gedung	100	4 gedung	11 gedung	55
5	06	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	20 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100	4 gedung	12 gedung	60
5	06	02			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	85 %				100			65
5	06	02	1,01		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	85 %				100			65
5	06	02	1,01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	560 orang	77 orang	125 orang	77 orang	0	125 orang	279 orang	49,82

5	06	02	1,01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Terselenggaranya Pertemuan Pejabat Pemerintah Aceh/DPR/DPD RI Asal Aceh dan Kegiatan Silaturahmi Pemerintah Aceh dan menyampaikan Program Pemerintah Aceh kepada Masyarakat Aceh di Jabodetabek	10 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	0	2 kegiatan	3 kegiatan	30
5	06	02	1,01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Aceh di Jakarta	50 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50	8 kegiatan	2 kegiatan	4
5	06	02	1,01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Potensi Aceh	10 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	0 kegiatan	0
5	06	02	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	7000 kali	1800 kali	1800 kali	1112 kali	61,78	1800 kali	4712 kali	67,31

**Tabel T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)*	Tahun 2023 (tahun n)	
1		3	4	5	6	7	9	10	11	13
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung pemerintah Aceh			65 %	85 %	80 %	100 %	0 %	80 %	
2	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani			125 orang	125 orang	125 orang	77 orang	0 orang	125 orang	
3	Jumlah Terselenggaranya Pertemuan Pejabat Pemerintah Aceh/DPR/DPD RI Asal Aceh dan Kegiatan Silaturahmi Pemerintah Aceh dan menyampaikan Program Pemerintah Aceh kepada Masyarakat Aceh di Jabodetabek			3 keg	3 keg	2 keg	1 keg	0 keg	2 keg	
4	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Aceh di Jakarta (Festival/Tahun)			11 keg	12 keg	2 keg	1 keg	0 keg	2 keg	
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Anjungan Aceh TMII			16.500 org	17.000 org	7.000 org	6.328 org	0 org	7.000 org	
6	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Potensi Aceh			2 keg	2 keg	2 keg	1 keg	0 keg	2 keg	
7	Tingkat Kepuasan Pengakses data dan informasi pada website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta			50 %	55 %	55 %	75 %	0 %	55 %	
8	Jumlah Pengakses data dan informasi pada website kantor Penghubung Aceh di Jakarta			2.500 org	2.800 org	2.800 org	80.000 org	0 org	2.800 org	
9	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung			1.600 kali	1.800 kali	1.500 kali	1.112 kali	0 kali	1.500 kali	

**TABEL T-C.31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2023**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5											
5	07										
5	07	01									
5	07	01	1,01								
5	07	01	1,01	06							
5	07	01	1,02								
5	07	01	1,02	01							
5	07	01	1,02	02							
5	07	01	1,05								
5	07	01	1,05	09							

5	07	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA</b>		100 %	4.882.360.683	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA		100 %	4.519.504.688	
5	07	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	Jakarta	4 Gedung	127.121.471	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	Jakarta	4 Gedung	54.205.380	
5	07	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	Jakarta	25 Unit	291.464.740	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	Jakarta	25 Unit	112.000.000	
5	07	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	3 Jenis	242.677.283	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	3 Jenis	438.188.262	
5	07	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	Jakarta	11 Bulan	2.127.482.060	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	Jakarta	11 Bulan	1.843.468.641	
5	07	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	14 Jenis	68.005.129	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jakarta	14 Jenis	53.261.050	
5	07	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	Jakarta	5 Jenis	36.570.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	Jakarta	5 Jenis	132.341.000	
5	07	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Jakarta dan provinsi lain	350 Kali	1.989.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Jakarta dan provinsi lain	350 Kali	1.886.040.355	
5	07	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah di BPPA</b>		100 %	3.930.524.409	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah di BPPA		100 %	352.299.870	
5	07	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jakarta	1 Unit	3.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jakarta	1 Unit	72.972.000	
5	07	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Rumah Dinas Gubernur , Mess Aceh, Rumah Dinas Kaban , Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	143.024.409	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Rumah Dinas Gubernur , Mess Aceh, Rumah Dinas Kaban , Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	73.340.370	
5	07	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	5 Unit	287.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	5 Unit	205.987.500	

5	07	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran BPPA</b>		100 %	3.385.240.739	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran BPPA		100 %	3.388.811.320	
5	07	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	Jakarta	160 Paket	247.250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	Jakarta	160 Paket	485.000.000	
5	07	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	Jakarta	12 Bulan	1.739.490.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	Jakarta	12 Bulan	1.901.311.320	
5	07	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	25 Unit	723.462.346	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	25 Unit	306.500.000	
5	07	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor/gedung	Jakarta	4 Gedung	675.038.393	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor/gedung	Jakarta	4 Gedung	696.000.000	
5	07	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPPA</b>		100 %	6.162.135.905	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPPA		100 %	7.870.799.732	
5	07	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/ operasional , 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	Jakarta	44 STNK, 200 Service	3.374.425.591	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/ operasional , 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	Jakarta	44 STNK, 200 Service	3.064.852.000	
5	07	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas ,Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	1.902.039.599	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas ,Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	4.065.772.932	

5	07	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	11	Gedung	885.670.715	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	11	Gedung	740.174.800	
5	07	02			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA</b>		75	%	5.371.500.895	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA		75	%	5.076.630.936	
5	07	02	1,01		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA</b>		75	%	5.371.500.895	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA		75	%	5.076.630.936	
5	07	02	1,01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	Jakarta dan provinsi lain	125	Orang	717.451.650	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	Jakarta dan provinsi lain	125	Orang	493.950.000	
5	07	02	1,01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	Jakarta dan provinsi lain	2	Kegiatan	814.545.000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	Jakarta dan provinsi lain	2	Kegiatan	473.923.000	
5	07	02	1,01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi promosi dan Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	12	Kegiatan	710.684.245	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi promosi dan Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	12	Kegiatan	578.900.000	
5	07	02	1,01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	2	Kegiatan	895.896.000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	2	Kegiatan	374.492.936	
5	07	02	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Jakarta dan provinsi lain	1800	Kali	2.232.924.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Jakarta dan provinsi lain	1800	Kali	3.155.365.000	

Tabel T-C.32  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU  
 KEPENTINGAN TAHUN 2023 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
			<b>NIHIL</b>		

**TABEL T-C.33**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 07	PENGELOLAAN PERBATASAN				32.650.000.000			53.890.000.000
5 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran		95 %	27.573.369.064		95 %	48.690.000.000
5 07 01 1,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselesaikannya Dokumen dan Laporan SAKIP		100 %	40.000.000		100 %	70.000.000
5 07 01 1,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP yang terselesaikan	Jakarta dan provinsi lain	5 Dokumen	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	70.000.000
5 07 01 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan BPPA		100 %	11.202.953.454		100 %	14.000.000.000
5 07 01 1,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	12 Bulan	10.380.473.454	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	9.500.000.000
5 07 01 1,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	12 Bulan	822.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	4.500.000.000
5 07 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian di BPPA		100 %	199.000.000		100 %	450.000.000
5 07 01 1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jakarta dan provinsi lain	110 Pegawai	199.000.000		110 Pegawai	450.000.000

5	07	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA		100 %	4.519.504.688		100 %	6.070.000.000
5	07	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	Jakarta	4 Gedung	54.205.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Gedung	250.000.000
5	07	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	Jakarta	25 Unit	112.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	750.000.000
5	07	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	3 Jenis	438.188.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis	450.000.000
5	07	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	Jakarta	11 Bulan	1.843.468.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Bulan	2.500.000.000
5	07	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	14 Jenis	53.261.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Jenis	80.000.000
5	07	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	Jakarta	5 Jenis	132.341.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Jenis	40.000.000
5	07	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Jakarta dan provinsi lain	350 Kali	1.886.040.355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 Kali	2.000.000.000
5	07	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah di BPPA		100 %	352.299.870		100 %	5.900.000.000
5	07	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jakarta	1 Unit	72.972.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	5.000.000.000

5	07	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Rumah Dinas Gubernur , Mess Aceh, Rumah Dinas Kaban , Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	73.340.370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Gedung	500.000.000
5	07	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	5 Unit	205.987.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	400.000.000
5	07	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran BPPA		100 %	3.388.811.320		100 %	4.400.000.000
5	07	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	Jakarta	160 Paket	485.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160 Paket	500.000.000
5	07	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	Jakarta	12 Bulan	1.901.311.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	2.500.000.000
5	07	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	25 Unit	306.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	800.000.000
5	07	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor/gedung	Jakarta	4 Gedung	696.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Gedung	600.000.000
5	07	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPPA		100 %	7.870.799.732		100 %	17.800.000.000
5	07	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnnya administrasi kendaraan dinas/ operasional , 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	Jakarta	44 STNK, 200 Service	3.064.852.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44 STNK, 200 Service	2.000.000.000

5	07	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas ,Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	Jakarta	11 Gedung	4.065.772.932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Gedung	15.000.000.000
5	07	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	11 Gedung	740.174.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Gedung	800.000.000
5	07	02			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA		75 %	5.076.630.936		80 %	5.200.000.000
5	07	02	1,01		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA		75 %	5.076.630.936		80 %	5.200.000.000
5	07	02	1,01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	Jakarta dan provinsi lain	125 Orang	493.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125 Orang	1.000.000.000
5	07	02	1,01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	Jakarta dan provinsi lain	2 Kegiatan	473.923.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Kegiatan	700.000.000
5	07	02	1,01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitas promosi dan Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	12 Kegiatan	578.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Kegiatan	500.000.000
5	07	02	1,01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	Jakarta dan provinsi lain	2 Kegiatan	374.492.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Kegiatan	750.000.000
5	07	02	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Jakarta dan provinsi lain	1800 Kali	3.155.365.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1800 Kali	2.250.000.000

**TABEL T-C.34**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**  
**TAHUN 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
5	07				<b>PENGLOLAAN PERBATASAN</b>			<b>32.650.000.000</b>
5	07	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95 %	<b>27.573.369.064</b>
5	07	01	1,01		<b>Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Dokumen dan Laporan SAKIP	100 %	<b>40.000.000</b>
5	07	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP yang terselesaikan	5 Dokumen	40.000.000
5	07	01	1,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan BPPA	100 %	<b>11.202.953.454</b>
5	07	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.380.473.454
5	07	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana Penunjang Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	822.480.000
5	07	01	1,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian di BPPA	100 %	<b>199.000.000</b>
5	07	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	110 Pegawai	199.000.000
5	07	01	1,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum BPPA	100 %	<b>4.519.504.688</b>
5	07	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	4 Gedung	54.205.380
5	07	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perangkat dan peralatan perkantoran	25 Unit	112.000.000
5	07	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	438.188.262
5	07	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan dan Pegawai yang Bekerja diluar Jam Dinas	11 Bulan	1.843.468.641
5	07	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	53.261.050
5	07	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Pengetahuan	5 Jenis	132.341.000
5	07	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Kordinasi Dalam dan Luar Daerah	350 Kali	1.886.040.355

5	07	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah di BPPA	100 %	<b>352.299.870</b>
5	07	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	72.972.000
5	07	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Rumah Dinas Gubernur , Mess Aceh, Rumah Dinas Kaban , Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	11 Gedung	73.340.370
5	07	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	205.987.500
5	07	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran BPPA	100 %	<b>3.388.811.320</b>
5	07	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	160 Paket	485.000.000
5	07	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas & Anjungan Aceh	12 Bulan	1.901.311.320
5	07	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	306.500.000
5	07	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedianya jasa kebersihan kantor/gedung	4 Gedung	696.000.000
5	07	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPPA	100 %	<b>7.870.799.732</b>
5	07	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Lengkapnya administrasi kendaraan dinas/ operasional , 2. Terpeliharannya Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang dan Biaya Bahan Bakar Minyak	44 STNK, 200 Service	3.064.852.000
5	07	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor, Mess Aceh, Rumah Dinas ,Anjungan Aceh dan Asrama Aceh	11 Gedung	4.065.772.932
5	07	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	11 Gedung	740.174.800
5	07	02			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	75 %	<b>5.076.630.936</b>
5	07	02	1,01		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	75 %	<b>5.076.630.936</b>
5	07	02	1,01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Aceh yang Dilayani	125 Orang	493.950.000

5	07	02	1,01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan pertemuan pejabat pemerintah aceh dan masyarakat aceh di Jabodetabek dan sekitarnya	2 Kegiatan	473.923.000
5	07	02	1,01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan fasilitas promosi dan Seni Budaya Aceh	12 Kegiatan	578.900.000
5	07	02	1,01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Festival Seni Budaya Aceh	2 Kegiatan	374.492.936
5	07	02	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	1800 Kali	3.155.365.000